REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA
TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aburaera, Sukarno, et. al. 2013. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana

Alamsyah Wana, 2018. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi tahun* Indonesia Corruption Watch.

Arief Barda Nawawi, 2008. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang

_____, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta

_____, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2

Ashofa Burhan, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Alatas Syed Hussein, 1983. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, PL3S ,Jakarta

Achmad Yulianto, Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Budiman Arif, 1991. *Negara dan Pembangunan,* Salatiga, Yayasan Padi dan Kapas,Jakarta

Bawengan, 1991. Pengantar Psikologi Kriminal, Prandya Paramita, Jakarta Chaerudin, Dinar Ahmad, Fadillah Syarif, 2008*, Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung

B.N. Marbun, 2018, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Chazawi Adam, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I,* Raja Grafindo, Persada, Jakarta

CST Kansil. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai. Pustaka

Danil Elwi, 2012, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Raja Grafindo, Jakarta

Effendy Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Friedrich Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung

Hamzah Andi 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Hubberman Michael, Matthew B. Miles 2007. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta

John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence, dalam Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta

Jonkers, J. E., 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, diterjemahkan dari judul asli Handboek van het Nederlandsch Indisiche Strafrecht*, PT. Bina Aksara, Jakarta,

Kartanegara Satochid, 1998, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa.

Kartono Kartini,1988. *Patologi Sosial,* Rajawali, Jakarta

Komisi Yudisial, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Komisi Yudisial republic Indonesia, Jakarta

Kusumaatmaja Mochtar. 2000. *Masyarakat dan pembinaan Hukum Nasional.* Binacipta

Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung

Lebacqs Karen, 1986, *Teori Teori Keadilan – Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Nusa Media, Bandung,

Lintje Anna Marpaung, Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum, (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia), *Pranata Hokum, Volume 7 Nomor 1 Januari 2012*

Maheka Arya, 2006, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

Marzuki Peter Mahmud 2005. *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group,

REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA
TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jakarta

Marpaung Laden. 2008. *Asas Teori Praktek Hukum* Pidana Sinar grafika Offset. Jakarta

Muladi, 2005, *Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Makalah, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI. Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997*, Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

----------,1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Mulyadi Lilik, 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung

Mertokusumo Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moleong Lexy, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya. Bandung

Moeljatno, 1987. A*zas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara , Jakarta

Mahkamah Agung RI, 2003. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Pusdiklat, Jakarta

Nurbani Septiana, Salim HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Paul M. Stein, Imprisonment for Nonpayment of Fines and Costs: A New Look at the Law and the Constitution, Vanderbilt Law Review Volume 22 Issue 3 Issue 3 - April 1969 Article 8 4-1969

Pope Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor, Jakarta

Puspita Nanang, 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*/Anti Korupsi Jakarta:Kemendikbud.

Rasyidi Lili. 2001. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bhakti. Bandung

Rohim, 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok

Rahayu Esmi Wirasih Puji, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang

REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Raharjo Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung Saleh Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

_____, 2006. *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung

_____, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CetakanKesatu, Genta Publising, Yogyakarta

_____, 2018, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung:Penerbit Alumni

Setiadi, W. 2018. Penegakan Hukum Kontribusinya bagi Pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, *48*(2), 1-22.

Setiono, 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Sihombing, 2005. *Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta

Sutopo, HB, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* UNS Press, SurakartaSudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Tranparency International, 2018. *Corruption Perception Indeks*, Berlin,Germany

Waluyo Bambang, 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta

World bank, 2003. *Combating Corruption in Indonesia Enhancing Accountability for Development*, East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit

Wignjosoebroto Soetandyo, 2002. *Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya,* Elsam dan Huma cetakan pertama

Zainal Asikin dan Amiruddin, 2001. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

Instruksi Presiden RI No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2.4.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-184/F/Fpk/4/1993, tertanggal 2 April 1993, tentang Putusan Pengadilan yang Tidak Memuat Hukuman Tambahan berupa Uang Pengganti

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

TAP PMR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

C. Jurnal dan Disertasi

Akhiar Salmi, 2009, Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu, Kini dan Masa Datang, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI

Apripari Irham, "Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi dalam Rome Statute", *SASI Jurnal, Volume 26 Nomor 4, Oktober – Desember 2020*, https://fhukum.unpatti.ac.id/, Diakses 4 Agustus 2022 Jam 12.19 WIB

Ade Mahmud , Urgensi Penegakan Hukum Progresif untuk mengembalikasn kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, *Juli 2020, Halaman 256-271 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 256*

Any Ismayawati, Pengaruh Budaya Hukum terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Pranata Hukum Volume 6 Nomor 1 Januari 2011*

Andi Irfan, Rekonstruksi Paradigma Hukum hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makasar, *Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18 No. 1 Januari 2018 ISSN 1411-9781*

Azmi Fendri, 2019, "Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia" , *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2*, Unand Limau Manis Padang

Ari Wisnu Aji, Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono, Peran Kejaksaan dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah), *Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3 Tahun 2016*

Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat damn Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan*

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014

Ayudo Bagus Priyo, 2012, "Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli warisnya menurut system hukum Indonesia", Disertasi. Universitas Andalas, Padang

Basir Rohrohmana, Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1 Tahun 2017*

Basri. 2017. Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. *Jurnal Varia Justicia, Vol. 13,(No.2), hlm. 82*

Bambang Arjuno, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap pelapor TindakPidana Korupsi (Whisttleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) di Indonesia, *Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2, Mei2017. p - 2354-8649 I e - 2579-5767 Open Access at:http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat*

Budi Suhariyanto, Penerapan Pidana uang pengganti kepada korporasi dalam perkara korupsi demi pemulihan kerugian keuangan negara, *Jurnal RechtsVinding, Vol. 7 No. 1, April 2018, hlm. 113–131*

Darsono. 2019. "Korupsi sebagai kompensasi underpayment: Suatu Tinjauan Teori EQuality". *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 3 (2), 477-87. https://doi.org/10.34208/jba.v3i2.524.

Deddy Candra, Arfin, Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional, *Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018Hlm. 28-55*

Dewa Gede Atmadja, Asas asas hukum dalam sistem hukum, *Kerta Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018*

Dyka Nurchaesar, Muhammad Rusli Arafat, Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat, JUSTITIA : *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398 http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 8 No. 4 Tahun 2021, Diakses 1 Januari 2023 Jam 13.25 WIB*

Edi Setiadi, Pembinaan Kelembagaan dan Pranata Hukum terhadap Birokrasi (Mengisi Pelaksanaan Otonomi Daerah), *Mimbar No.2 Th.XVII Apr.± Jun. 2011*

Eddy O.S Hiariej, 2019, United Nations Convention against corruption dalam

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sistem hukum Indonesia, *MIMBAR HUKUM* Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, Halaman 112-125

Erly Pangestuti, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban, *Jurnal Yustitabelen, Penerbit Universitas Tulungagung, Vol. 3 No 1 (2017)*

Helmi Muammar, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, Aryo Caesar Tanihatu, Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, *Widya PRanata Hukum Vol. 3, No. 2, September 2021*

Herlambang. 2011, "Tindak Pidana Untuk Penerima Hasil Korupsi", *Disertasi,* Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang

Heski HR. Wullur, 2015, "Peranan Jaksa terhadap Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015

Hikmahatus Syuraida, Perkembangan Pemberantasan Koruposi di Indonesia, AVATARA, *e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, Juli 2015 hlm. 230*

Harkristuti Harkrisnowo, 2002. "Korupsi Konspirasi dan Keadilan diIndonesia", *Jurnal Dictum, LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta*

Ilham, R. 2018. The impact of organizational culture and leadership style on job satisfaction and employee performance. *Journal of Advanced Management Science, 6(1), 50-53.*Diakses 2 Januari 2023 Jam 12.47 WIB

Inggrid Pilli, Hukuman tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015*

Irmansyah, 2007, "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal DEMOKRASI Vol. VI No. 2*

Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020*

Ika Darmika, Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadapPenegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 2 No. 3, Desember 2016*

Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang- Undangan untuk mewujudkan kesejahteraan, *Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015*

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kamaruddin, Membangun Kesadaran dan ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement, *Jurnal Al-'Adl I, Vol. 9 No. 2, Juli 2016*

Kristian, Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014

Lukas Ade Paul. 2010, "Efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010*

M. Agus Santoso, "Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi Bagi Pegawai Negeri yang Sedang Menjalankan Tugas Administrasi Negara" *Jurnal Borneo Administrator Vol. 7 No. 2 Tahun 2011*

Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief,Hardianto Djanggih, Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, *Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019 FakultasHukum Universitas Diponegoro*

Mahfud, A. (2017). Empowernment and Anti- Corruption NGO's. *International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 14. (Issue 4. December), p.118-123*

M.Syamsudin, Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum, *UNISIA, Vol. XXX No. 64 Juni 2007*

Maryanto, 2012, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, Nomor 2*

Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (laws and regulations in Indonesia as the means of Realizing the country goal, *https://e-jurnal.peraturan.go.id/*

Mompang L. Panggabean, "Kebijakan Legislatif Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia", *https://ejournal.undip.ac.id Diakses 5 Maret 2020Jam 11.11 WIB*

Malthuf Siroj, Penegakan hukum progresif: Upaya mewujudkan keadilan substantif, *Hamka*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2017

Manegeng, Rebeca V. 2014. Penghalang Dan Pencegahan Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Lex et Societatis, Vol. 2, (No.8), hlm.50-59*

REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA
TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

MSyamsudin, Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum, *Jurnal UNISIA, Vol.XXX No. 64 Juni 2017*

Malthuf Siroj, Penegakan Hukum Progresif: Upaya mewujudkan keadilan substantif, *Hamka*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2017

Mudemar A. Rasyidi, 2020, Korupsi adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran agama, http://journal.universitassuryadharma.ac.id Diakses 23 September 2022 Jam 15.39 WIB

Nazaruddin Lathif, Teori Hukum sebagai Sarana / alat untuk pembaharuan atau merekayasa masyarakat, *Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017*

Ni Putu Yulita Damar, Sagung Putri M.E Purwani, Urgensi PembharuanHukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara, Vol 9 No.8 Tahun 2020, hlm. 1-13.*

Noveria Devy Irmawanti1, Barda Nawawi Arief , Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 217-227

P. Hutagalung, Budaya Malu, Budaya Salah dan Budaya Hukum, *JurnalHukum dan Pembangunan Tahun ke-37 NO.3 Juli-September 2007*

Putri Hanida, Bimbi Irawan, Fachrur Rozi, Strategi Eliminasi Praktik Korupsipada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Komisi Pemberantasan Korupsi, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2) 297-312 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.

Puteri Hikmawati, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal? , *NEGARA HUKUM:* Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hlm. 89

Pius Bere. 2016, "Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi". *Disertasi,* Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Udayana Bali

Pohan, S. 2014. Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia DanBeberapa Negara Dunia. *Jurnal Justitia, Vol.1 (No.3), pp.271- 303,p.271.*

Puteri Hikmawati, 2019, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi", Dapatkah Optimal*?, Jurnal negara Hukum, Vol. 10, No. 1, Juni 2019*

Rambey Guntur.. 2016, "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda". *De Lega Lata. Volume I. Nomor 1. Januari-Juni 2016*

Rogaiyah, Putusan Contra Legem sebagai implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi No. 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007) *Jurnal Qiyas Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hlm. 169, Diakses 2 Januari 2023 Jam 16.19 WIB*

Sandy Doyoba Alexsander, Yeni Widowaty, Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Indonesian *Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), hlm 72, Diakses 2 Januari 2023 Jam 16.30 WIB*

Saleh Roeslan, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta Sitompul Hotma PD, 2016," Pelaksanaan Asset Recovery dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut HUkum Pidana dan Hukum Perdata Indonesia" Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, UGM, Yogyakarta

Salman Luthan, 2019, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *JURNAL HUKUM* NO. 1 VOL. 16 JANUARI, 1 – 17

Setiadi Wicipto, 2018. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatandan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". *Jurnal Legislasi*,

Subagja Jaja, 2015, Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak PidanaKorupsi, Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya

Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008*

Sedarmayanti, Strategi Penguatan Etika dan integritas birokrasi dalam rangka pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pelayanan, *Jurnal IlmuAdministrasi, Voklume IX, Nomor 3, Desember 2012*

Sri Sulistyawaty Nelvitia Purba, Strategi Pencegahan Korupsi dengan BudayaMalu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia dengan Jepang), *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 4. No. 1 Mei 2019*

Tri Nada Sari, Elly Sudarti, Yulia Monita, Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana

REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, *PAMPAS: Journal of Criminal Volume 2 Nomor 2, 2021 (ISSN 2721-8325)*

Tuti Haryati, Hukum dan Masyarakat, *Tahkim Vol. X No. 2, Desember 2019*

Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019: 33 - 54 P-ISSN: 1693-4458 E-ISSN: 2598-5906 33*

Wahyu Nugroho, Rule Breaking and Integritas Penegak Hukum Progresif dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 Rule Breaking and Progressive Law Enforcer's Integrity In the Effort of Eradicating Corruption Committed by Local Officials, *Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87*

Wicipto Setiadi, 2018, " Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". *Jurnal Legislasi Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602*

Wiwik Harjanti, 2011, "Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia (The influence of Public Interest Concept on the Indonesian Development)", *Risalah Hukum, Volume 7,Nomor 1, 26 Juni 2011, 92-101 ISSN 0216-969X 92*

Wirya Dinata, "Legal implications of non-complience with the decision of thestate administratrive court in term of the implementation of regional autonomy and the unitary state", *Jurnal Hukum Peratun, Volume 4* Nomor 1 Februari 2021

Yayan Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cepalo, 2 (2), (2018): 121-128.*

Yanto Sufriadi, Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum ditengah Krisis Demokrasi, *JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 17 APRIL 2010: 233 - 248*

D. Internet

Anonim,2014, "Pengembalian Uang Negara Hasil Penindakan Kasus Korupsi *(2014-2018)*" *https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pengembalian-uang-negara-hasil-penindakan-kasus-korupsi-2014-2018-Diakses, 22 November 2019 Jam 14.32 WIB*

Anonim, 2016, Catatan Upaya Hukum yang dilakukan Oleh Buronan / DPO dalam perkara Pidana di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, https://icjr.or.id/, Diakses 4 Agustus 2022 Jam 17.26 WIB

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
Ismaya Hera Wardanie, Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum.; Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition. Akses 16 September 2018. http://www.thefreedictionary.com, Diakes 1 Januari 2023 Jam 12.18 WIB

Irfan Kamil, KPK sebut lamanya audit kerugian negara hambat pemnyidikan, https://nasional.kompas.com/. Diakses tanggal 3 Agustus 2022 Jam 11.41 WIB

Juhriyadi, 2019, Kejaksaan Agung Masih Inventarisir Koruptor Penunggak Uang Pengganti untuk digugat, *https://independensi.com/2019/Diakses* 24 November 2019 Jam 14.00 WIB

Kejaksaan Republik Indonesia, 2022, "Tugas dan Wewenang Jaksa", https://www.kejaksaan.go.id/ Diakses 3 Agustus 2022 Jam 12.33 WIB

Kejaksaan Republik Indonesia, 2022, "Profil Kejaksaan", https://www.kejaksaan.go.id/ Diakses 3 Agustus 2022 Jam 12.38 WIB

Liky Faizal, perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Perspektif Pembanguinan Nasional, Media Neliti, https://media.neliti.com/ Diakses 9 Agustus 2022 Jam 13.41 WIB

Nafisyul Qodar, 2019, "ICW sebut Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Belum Maksimal". *https://www.liputan6.com/news/ Diakses, 23 November 2019 Jam 8.25 Wib.*

Nirwanto D. Andhi, 2011, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah", *https://docplayer.info/73726025-Otonomi-daerah-versus-desentralisasi-korupsi.html Diakses 5 MAret 2020 Jam 10.34 WIB*

Permana Dany, 2012, "Kamis Pekan Depan AngelinaSondakh Jalani Sidang Perdana", *http://www.tribunnews.com/2012/09/02/kamis-pekan-depan-angelina-sondakh-jalani-sidang-perdana* Diakses pada Minggu, 14 Oktober 2012 Jam 08.05 WIB

Riki Perdana Raya Waruwu, 2022, "Rasa takut mengintervensi dan mengokohkan kemandirian hakim", https://mahkamahagung.go.id/, Diakses 3 Agustus 2022 Jam 12.29 WIB

Turiman, 2018, "Memahami hukum progresif Prof Satjipto Raharjo dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang membumi "*http://www.academia.edu/4647786/Memahami_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo,*